

PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

Pande Putu Maesa Eka Putra¹
Made Heny Urmila Dewi²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia
e-mail: maesapande95@gmail.com/ telp: +62 812 386 432 00

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah di Provinsi Bali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Karangasem, 2) Untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Karangasem, 3) Untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang berlokasi di Kabupaten Karangasem dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2010-2016, dengan teknik analisis jalur/*Path Analysis*. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan, hasil analisis menunjukkan bahwa. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap belanja modal. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan dana perimbangan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

Kata kunci: pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, dan kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Community welfare is a goal to be achieved by every region in Bali. Human Development Index is a variable used to look at the level of wellbeing. This study aims to 1) Know the influence of the original income and the balancing fund against capital expenditure in Karangasem regency, 2) To know the effect of the Original Regional Income, Balance Funds and Capital Expenditure to the community welfare in Karangasem regency, 3) To know the effect of Original Regional Income, Balancing Funds for Community Welfare through Capital Expenditure in Kabupaten Karangasem. This study is a quantitative descriptive study located in Karangasem Regency and in this study using secondary data 2010-2016, with path analysis techniques. In collecting data using non participant observation method, the result of analysis shows that. 1) Original Regional Income, and Balance Funds have a direct and significant effect on Capital Expenditure. 2) Original Regional Income, and Capital Expenditure have a direct and significant effect on the welfare of the community, while the Balance Funds have direct and insignificant effect on the welfare of the community. 3) Original Regional Income, and Balancing Funds significantly influence the welfare of the community through Capital Expenditure.

Keyword : original regional income, balance fund, capital expenditure, and public welfare

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya *et al*, 2013). Menurut Akudugu (2012), menyatakan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Menurut Kaur (2016), pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan yang bukan hanya di atas faktor fisik dan menurut Akonji *et al*. (2013), sebagian besar belanja publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu upaya pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan kesejahteraan. Provinsi Bali memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung redah dan masih terdapat disparitas antar daerah (Artana & Arka, 2015). IPM merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diukur dengan tiga standar indeks yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (Peggy dan Swaningrum, 2015). Menurut Bassam (2013) hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan dimana beberapa kebutuhan dari masyarakat tergantung dari seberapa besar pendapatan yang dimiliki untuk bisa memenuhi

kebutuhan hidupnya. Berikut data yang berkaitan dengan peningkatan IPM seluruh daerah di Provinsi Bali dari 2010–2016 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2010-2016 (Point)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Denpasar	79.19	79.77	80.45	81.32	81.65	82.24	82.58
Badung	75.84	76.66	77.26	77.63	77.98	78.86	79.80
Tabanan	70.68	71.35	71.69	72.31	72.68	73.54	74.19
Jembrana	66.70	67.53	67.94	68.39	68.67	69.66	70.38
Gianyar	71.45	72.50	73.36	74,00	74.29	75.03	75.70
Klungkung	66.01	67.01	67.64	68.08	68.30	68.98	69.31
Bangli	63.43	63.87	64.53	65.47	65.75	66.24	67.03
Karangasem	60.58	61.60	62.95	63.70	64.01	64.68	65.23
Buleleng	66.98	67.73	68.29	68.83	69.19	70.03	70.65
Provinsi Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2017

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan IPM di setiap masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali terus mengalami kenaikan, dimana IPM kabupaten/kota di wilayah SARBAGITA selalu berada di atas IPM Provinsi Bali sedangkan, IPM di luar wilayah SARBAGITA selalu berada di bawah IPM Provinsi Bali pada tahun 2016. IPM terendah berada pada Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 65.23 point yang berarti rata-rata angka harapan hidup di Kabupaten Karangasem mencapai 65 tahun. IPM Kabupaten Karangasem selama periode 2010-2016 jika dibandingkan dengan IPM nasional masih di bawah rata-rata, dimana IPM nasional pada tahun 2016 sebesar 70.18 point yang berarti rata-rata angka harapan hidup nasional mencapai 70 tahun. IPM sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di Kabupaten Karangasem menjadi yang paling rendah, sehingga dibutuhkannya perhatian pemerintah dalam masalah ketimpangan kesejahteraan antar daerah.

Meningkatnya IPM tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi, melainkan dari berbagai aspek pembangunan (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Pembangunan manusia merupakan konsep yang mempertimbangkan aspek dalam menopang hidup yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alexandra Hukom, 2014). Alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab ialah APBD dimana seluruh kegiatan atau kebijakan dari pemerintah bisa dilihat melalui APBD. Belanja daerah yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang merupakan tujuan dan kewajiban pemerintah melalui peningkatan pelayanan dasar seperti peningkatan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja (Pasal 167 ayat 3 UU No 32/2004). Salih (2012), menambahkan bahwa pengeluaran publik harus digunakan tepat sasaran. Pemerintah melakukan belanja modal guna untuk mendapatkan aset tetap pemerintah seperti peralatan, bangunan, dan infrastruktur lainnya. Inuwa (2012), menyatakan belanja pemerintah merupakan salah satu instrument penting untuk mengontrol perekonomian.

Belanja modal Kabupaten Karangasem sebesar 234 milyar rupiah dan tergolong rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur dan peralatan penunjang kesejahteraan masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Rendahnya belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karangasem memberi arti bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan masih rendah. Chinweoke

et al. (2014) menyatakan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatnya belanja modal akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, begitu juga menurut Nworji *et al.* (2012) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal. Fazoranti *et al.* (2012) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus mampu mengontrol belanja operasionalnya. Pendapatan daerah merupakan topangan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan apabila pengalokasiannya tepat sasaran akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan IPM. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa pemerintah harus mampu mengontrol proporsi belanja untuk dialokasikan lebih dalam belanja pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PAD dapat menggambarkan seberapa besar kemandirian suatu daerah, dengan PAD yang tinggi diharapkan tingkat investasi pada belanja modal juga ikut meningkat sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Badung sebesar 3,563 milyar rupiah pada tahun 2016. PAD Kabupaten Karangasem sebesar 233 milyar rupiah, adanya disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali yang sangat besar menyebabkan tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. Menurut Mehrara *et al.* (2011) menyatakan bahwa, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi hal penting

dalam ekonomi publik. Jumlah PAD yang dimiliki Kabupaten Karangasem yang bisa di katakan kecil membuat pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam melakukan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah harus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan menjadi daerah yang mandiri.

Nurudeen (2010) menyatakan bahwa, pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat besar melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (Dalamagas *et al*, 2010). Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan, masyarakat cenderung melakukan migrasi dari desa ke kota (Suartha dan Murjana, 2017). Desentralisasi diharapkan dapat mendorong pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan (Miranti *et al.*, 2014). Dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal, sehingga daerah mampu mengalokasinya untuk membangun fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ogujiuba *et al.* 2012). Wewenang daerah dalam mengatur sumber daya dan keuangan daerah merupakan cermin dari otonomi daerah , selain itu kebijakan otonomi dapat tercermin melalui keterbukaan ekonomi daerah tersebut (Fajrii, dkk. 2016).

Kabupaten Badung menerima dana perimbangan paling kecil pada tahun 2016 sebesar 543,3 milyar rupiah, dan Kabupaten Karangasem menerima dana perimbangan paling besar ke-tiga setelah Kabupaten Buleleng dan Tabanan tetapi IPM Kabupaten Karangasem tetap menjadi yang paling rendah diantara kabupaten/kota di Bali. Dana

perimbangan yang besar tersebut sebenarnya mampu digunakan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem untuk melakukan pembangunan melalui belanja modal yang tidak mampu dilakukan melalui anggaran yang bersumber dari PAD kabupaten, akan tetapi belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem masih tergolong kecil dengan jumlah dana perimbangan yang jumlahnya cukup besar. Dana perimbangan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah dengan mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi. Dana perimbangan dibedakan menjadi tiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dimana DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi dan menutup celah fiskal yang bertujuan meningkatkan potensi daerah, DAK bertujuan membiayai kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, DBH adalah dana dari APBN kepada daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah untuk dikembangkan.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1) Manfaat teoritis

Dapat memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem.

2) Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga daerah dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif mempunyai yang bertujuan menjelaskan fenomena empiris berdasarkan data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar variabel. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem dilihat dari tingkat IPM yang paling rendah daripada kabupaten/kota di Provinsi Bali, tingkat belanja modal yang paling rendah setelah Kabupaten Klungkung, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan Kabupaten Karangasem menjadi salah satu yang mendapatkan jumlah dana perimbangan yang besar ke-tiga dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan bantuan program *SPSS* versi 24.0 digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur path (*Path Analysis*), dimana metode ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan secara tidak langsung variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Jumlah variasi variabel Y1 yang tidak dijelaskan oleh X1 dan X2 ditunjukkan oleh nilai e_1 . Jumlah variasi variabel Y2 yang tidak dijelaskan oleh X1, X2, dan Y1 ditunjukkan oleh nilai e_2 , berikut adalah rumus untuk menghitung nilai kekeliruan taksiran standar:

$$e = \sqrt{1 - R^2} \dots\dots\dots (1)$$

Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Persamaan regresi yang digunakan untuk menghitung koefisien jalur dan menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan, yaitu:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots (2)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (3)$$

Pengujian pengaruh tidak langsung

Uji Sobel digunakan untuk pengujian variabel intervening, dimana dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y2 melalui Y1 dan pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y2 melalui Y1. Variabel X1 berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Y2 melalui variabel Y1. Standar *error* koefisien β_1 dan β_5 , nilai standar *error* tidak langsung $S_{\beta_1\beta_5}$, sebagai berikut :

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2} \dots\dots\dots (4)$$

Variabel X2 berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel Y2 melalui variabel Y1. Standar *error* koefisien β_2 dan β_5 , nilai standar *error* tidak langsung $S_{\beta_2\beta_5}$, sebagai berikut :

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2} \dots\dots\dots (5)$$

Uji z dapat digunakan untuk mencari pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap variabel Y2 melalui variabel Y1, dengan rumus berikut ini:

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}} \dots\dots\dots (6)$$

Uji z dapat digunakan untuk mencari pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap variabel Y2 melalui variabel Y1, dengan rumus berikut ini:

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}} \dots\dots\dots (7)$$

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Langsung

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai sig 0.042 PAD yang lebih kecil dari nilai alfa 0.05 menunjukkan pengaruh signifikan PAD terhadap belanja modal, artinya setiap kenaikan PAD sebesar satu milyar rupiah maka belanja modal akan meningkat sebesar 0.380 milyar rupiah dengan anggapan faktor lainnya konstan.

Tabel 2. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.755	22.501		-.389	.717
PAD	.380	.129	.503	2.942	.042
Dana Perimbangan	.163	.052	.534	3.126	.035

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Dalam penelitian ini diperoleh hubungan positif antara PAD terhadap belanja modal, hasil yang sama diperoleh oleh Panji (2014) dimana dalam penelitiannya pengaruh positif dan signifikan variabel PAD terhadap belanja modal. Mawarni, dkk (2013), dalam penelitiannya juga memperoleh hasil yang sama dimana dilakukan pada kabupaten/kota di Aceh. Peningkatan PAD ini akan meningkatkan investasi belanja

modal sehingga mampu meningkatkan pembangunan prasarana publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Belanja modal yang dilakukan berupa penambahan asset tetap atau kekayaan daerah serta biaya perawatan dengan pembiayaan dari PAD, sehingga dalam penelitian ini mendapatkan hubungan yang positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal.

Nilai sig. 0.035 dana perimbangan lebih kecil daripada alfa 0.05 menunjukkan bahwa pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap belanja modal, artinya setiap kenaikan dana perimbangan sebesar satu milyar rupiah maka belanja modal akan meningkat sebesar 0.163 milyar rupiah dengan anggapan faktor lainnya konstan. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), Nugraeni (2011) dan Mawarni (2013). Dana perimbangan yang meningkat akan mampu menopang belanja modal yang belum bisa dilakukan oleh daerah karena keterbatasan anggaran. Kemampuan masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD saja akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah semakin besar, maka dari itu melalui dana perimbangan pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi fiskal, yang nantinya pemerintah daerah dalam melakukan tambahan belanja bersumber dari dana perimbangan tersebut. Dana perimbangan akan di realisasikan untuk belanja kepentingan umum dan kepentingan khusus sesuai dengan prioritas nasional dan pengembangan potensi wilayah daerah agar terciptanya kesejahteraan di daerah tersebut.

Hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa PAD dengan nilai sig. 0.000 < 0.05 menunjukkan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya apabila PAD naik satu milyar rupiah maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,009 point dengan anggapan faktor lainnya konstan.

Tabel 3. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	57.993	.163		354.875	.000
PAD	.009	.002	.366	5.271	.013
Dana Perimbangan	.002	.001	.192	2.649	.077
Belanja Modal	.015	.004	.478	4.176	.025

a. Dependent Variabel: Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian Mahendra dan Ulupui (2015) juga memperoleh hasil yang sama, dimana PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. PAD dalam prosesnya sebagai pendapatan suatu daerah akan menjadi dana pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan suatu daerah melalui belanja daerah guna mencapai tujuan kesejahteraan. PAD harus dialokasikan lebih untuk melakukan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pengembangan potensi wilayah sehingga komponen dalam IPM mampu di tingkatkan, hal ini berarti PAD yang diperoleh daerah Kabupaten Karangasem sudah tepat sasaran untuk tujuan

pembangunan kesejahteraan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga PAD berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain PAD merupakan salah satu indikator yang menunjang tingkat kesejahteraan.

Nilai sig. dana perimbangan $0.077 > 0.05$ menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya setiap kenaikan dana perimbangan tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan anggapan faktor lainnya konstan, hal ini menunjukkan kemungkinan pengalokasian dana perimbangan untuk pembangunan kesejahteraan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan yang layak masih sedikit. Nilai sig. 0.002 belanja modal yang lebih kecil dari 0.005 menunjukkan pengaruh signifikan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat, artinya setiap kenaikan belanja modal sebesar satu milyar rupiah maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0.015 point dengan anggapan faktor lainnya konstan. Hasil yang sama juga diperoleh dalam beberapa penelitian yaitu, Wijayanti (2014), dimana DAU yang merupakan bagian dari dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Harahap (2010), dimana DAU, DAK, dana DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Seharusnya dana perimbangan yang diberikan

pemerintah pusat kepada daerah digunakan sesuai tujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dalam menjalankan pembangunan.

Hasil Pengujian Analisis Jalur

Hubungan antar variabel penelitian dapat diketahui dari hasil penelitian, yang merupakan koefisien jalur penelitian. Model tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut.

Persamaan struktur 1

$$Y_1 = 0,380X_1 + 0,163X_2 + e_1$$

Persamaan struktur 2

$$Y_2 = 0,009 X_1 + 0,006 X_2 + 0,007 X_3 + e_2$$

Nilai kekeliruan taksiran standar

Varian variabel belanja modal (Y1) yang tidak dijelaskan oleh PAD (X1) dan dana perimbangan (X2) ditunjukkan oleh nilai e_1 dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,953^2} = 0,216 \end{aligned}$$

Varian variabel kesejahteraan masyarakat (Y2) yang tidak dijelaskan oleh PAD (X1), dana perimbangan (X2) dan belanja modal (X2) ditunjukkan oleh nilai e_2 dengan menggunakan rumus:

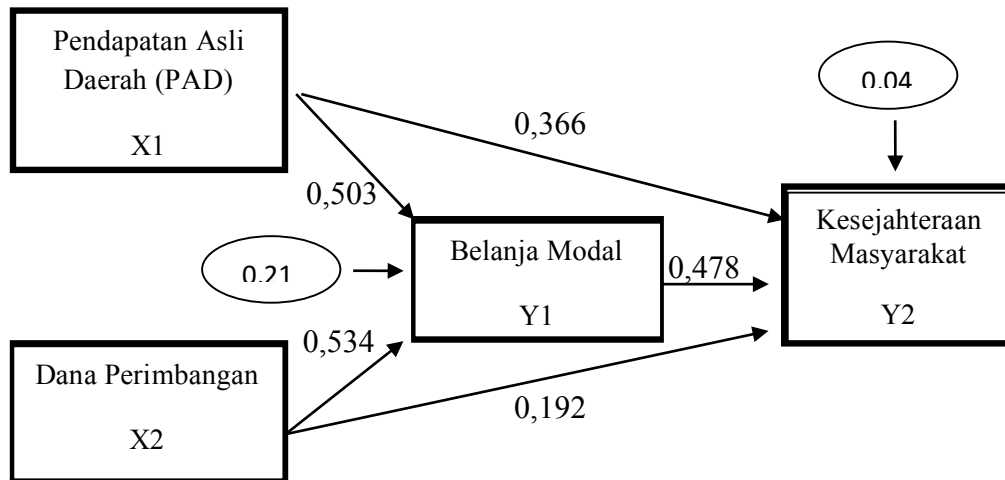
$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,998^2} = 0,044 \end{aligned}$$

Pemeriksaan Validitas Model

Untuk memeriksa validitas model penelitian ni menggunakan koefisien determinasi total sebagai indikatornya dimana hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2 \\
 &= 1 - (0,216)^2 - (0,044)^2 \\
 &= 1 - (0,046) - (0,002) \\
 &= 0,99
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh bahwa sebesar 99 persen keragaman data mampu dijelaskan oleh model dimana dapat diartikan informasi yang terkandung di dalam data sebesar 99 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.



Gambar 1. Diagram Hasil Analisis Jalur

Pengaruh tidak langsung

- 1. Pengaruh tidak langsung PAD terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal**

i. Rumusan hipotesis

H_0 : Belanja modal bukan sebagai variabel intervening pengaruh tidak langsung PAD terhadap kesejahteraan masyarakat.

H_1 : Belanja modal sebagai variabel intervening pengaruh tidak langsung PAD terhadap kesejahteraan masyarakat.

ii. Kriteria pengujian yang digunakan

1. Jika z hitung $\leq 1,96$ maka H_0 diterima, berarti belanja modal bukan merupakan variabel intervening

2. Jika z hitung $\geq 1,96$ maka H_0 ditolak, berarti belanja modal merupakan variabel intervening

iii. Statistik uji

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = \sqrt{(0,015^2)0,129^2 + (0,380^2)0,004^2}$$

$$S_{\beta_1\beta_5} = 0,0024$$

Nilai z dari koefisien ab digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_1\beta_5}{S_{\beta_1\beta_5}}$$

$$z = \frac{(0,380)(0,015)}{0,0024}$$

$$z = 2,375$$

iv. Simpulan

Oleh karena nilai z hitung lebih besar dari 1,96 yaitu sebesar 2,375 maka belanja modal (Y2) adalah variabel intervening PAD (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) di Kabupaten Karangasem.

Hasil variabel belanja modal sebagai intervening sesuai dengan penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), Suwandi dan Tahar (2015), dan Siswadi, dkk (2015) dimana belanja modal memediasi hubungan antara PAD dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan belanja modal dimana pembangunan pelayanan publik terus dilakukan seperti prasarana kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan, sehingga untuk meningkatkan belanja modal pemerintah harus mampu menggali PAD yang besar. PAD yang besar mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan.

2. Pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal

i. Rumusan hipotesis

H_0 : Belanja modal bukan sebagai variabel intervening pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H_1 : Belanja modal sebagai variabel intervening pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

ii. Kriteria pengujian yang digunakan

1. Jika z hitung $\leq 1,96$ maka H_0 diterima, berarti belanja modal bukan merupakan variabel intervening
2. Jika z hitung $\geq 1,96$ maka H_0 ditolak, berarti belanja modal merupakan variabel intervening

iii. Statistik uji

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = \sqrt{(0,015^2)0,052^2 + (0,163^2)0,004^2}$$

$$S_{\beta_2\beta_5} = 0,0010$$

Nilai z dari koefisien ab digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung, dimana dengan rumus sebagai berikut:

$$z = \frac{\beta_2\beta_5}{S_{\beta_2\beta_5}}$$

$$z = \frac{(0,163)(0,015)}{0,001}$$

$$z = 2,445$$

iv. Simpulan

Oleh karena nilai z hitung lebih besar dari 1,96 yaitu sebesar 2,445 berarti belanja modal (Y_2) adalah variabel intervening dana perimbangan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) di Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian belanja modal sebagai variabel intervening dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan penelitian Adiputra, dkk (2014), dan Siswadi, dkk (2015) bahwa belanja modal memediasi dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar adanya ketimpangan pendapatan antar daerah mengharuskan pemerintah pusat melakukan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan merupakan anggaran yang berasal dari APBN untuk tujuan desentralisasi fiskal, setelah pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan diharapkan daerah mampu mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur melalui belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan diukur menggunakan IPM dimana pemerintah harus mampu membangun IPM dari dana perimbangan melalui belanja modal seperti pembangunan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat diantaranya pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan untuk mengurangi kemiskinan dan pendapatan yang layak untuk kesejahteraan masyarakat,

sehingga hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa belanja modal sebagai variabel intervening atau memediasi dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. Pengaruh Total, Langsung dan Tidak Langsung Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali 2010-2016

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	
X1 → Y1	0,503		0,503
X1 → Y2	0,366	0,240	0,606
X2 → Y1	0,534		0,534
X2 → Y2	0,192	0,255	0,447
Y1 → Y2	0,478		0,478

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung PAD (X1) terhadap belanja modal (Y1) adalah 0,503, tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut sehingga pengaruh totalnya 0,503 yang artinya pengaruh langsung PAD terhadap belanja modal secara langsung sebesar 50,3 persen. Pengaruh tidak langsung PAD (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja modal (Y1) adalah sebesar 0,240, nilai ini berarti bahwa pengaruh tidak langsung PAD terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal adalah sebesar 24 persen.

Pengaruh langsung dana perimbangan (X2) terhadap belanja modal (Y1) adalah 0,534, tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut sehingga pengaruh totalnya 0,534 yang artinya pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja modal secara langsung sebesar 53,4 persen. Pengaruh tidak langsung dana

perimbangan (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja modal (Y1) adalah sebesar 0,255, nilai ini berarti bahwa pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal adalah sebesar 25,5 persen. Pengaruh langsung belanja modal (Y1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) adalah 0,478, tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut sehingga pengaruh totalnya 0,478 yang artinya pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja modal secara langsung sebesar 47,8 persen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu.

- 1) PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara langsung terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil diagram analisis jalur, pengaruh dana perimbangan lebih tinggi dibandingkan dengan PAD, hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Pengaruh langsung PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal artinya, pemerintah daerah sudah memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan publik melalui belanja modal yang dilakukan serta, biaya yang dilakukan melalui pembiayaan dari PAD maupun dana perimbangan. Pembangunan prasarana publik lebih banyak dilakukan melalui dana perimbangan dikarenakan anggaran dari PAD masih terbatas, sehingga untuk menciptakan daerah yang mandiri pemerintah harus mampu

membangun prasarana publik dengan anggaran PAD lebih tinggi daripada dana perimbangan agar tidak tergantung dengan anggaran pusat.

- 2) PAD, dan Belanja Modal berpengaruh langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat mampu dilakukan PAD dan belanja modal melalui peningkatan ketiga komponen kesejahteraan yaitu 1) indeks angka harapan hidup, 2) tingkat pendidikan dan 3) pendapatan perkapita. PAD yang semakin tinggi akan mampu meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, serta dengan meningkatnya belanja modal akan meningkatkan kesejahteraan melalui penambahan aset tetap penunjang kesejahteraan seperti sekolah, rumah sakit, dll. Dana perimbangan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan belum mampu meningkatkan komponen kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
- 3) PAD, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal. PAD dan dana perimbangan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, semakin tinggi PAD dan dana perimbangan semakin tinggi alokasi dana untuk belanja modal dalam peningkatan pembangunan prasarana publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Tepatnya alokasi dana yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan akan mampu meningkatkan

kualitas kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas SDM yang baik, pembangunan sarana kesehatan akan mampu menciptakan tingkat kesehatan dan harapan hidup yang tinggi, pembangunan lapangan pekerjaan akan mampu mengatasi jumlah pengangguran dan kemiskinan dengan pendapatan yang layak, sehingga belanja modal sebagai belanja pembangunan dalam meningkatkan asset pemerintah diharapkan di prioritaskan untuk pembangunan prasarana kepentingan publik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini sehingga dapat disarankan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem masih tergolong rendah jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti sektor kehutanan/pertanian, perikanan, dan tambang yang cukup besar. Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi wilayah yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mampu menarik dan mempermudah para investor untuk mau berinvestasi, sehingga pendapatan pajak daerah mampu untuk di tingkatkan. BUMD juga merupakan sumber pendapatan PAD sehingga pemerintah harus mampu mengembangkan BUMD

yang produktif dan berpengaruh positif terhadap PAD. BUMD juga harus mampu memajukan sektor usaha yang belum dimani swasta, membantu pengembangan usaha kecil, pendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang sehingga masyarakat merasa tingkat kehidupannya lebih baik. Berkembangnya BUMD diharapkan meningkatkan PAD dan akan meningkatkan belanja modal sehingga meningkatkan pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

- 2) Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat harus mampu di alokasikan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah mengatasi ketimpangan fiskal dan tujuan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem agar memaksimalkan dana yang diberikan pemerintah pusat dan dana yang dimiliki daerah untuk kepentingan pembangunan prasarana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sarana kesehatan harus dilakukan pemerintah ke seluruh daerah agar tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik dan tingkat harapan hidup yang tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan merupakan alasan pemerintah harus meningkatkan belanja pembangunan berupa sarana pendidikan yang merata di wilayah Kabupaten Karangasem agar tingkat pendidikan menjadi lebih baik. Pendapatan masyarakat di Kabupaten Karangasem yang tergolong rendah, sehingga di sarankan pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menciptakan

SDM yang lebih baik dan membangun lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiputra, Dwiyantari dan Darmadi. 2014. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali). *Jurnal Akuntansi*. 7(3).
- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakilia, A. M. 2013. Nexus Between Publik Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*. 2(4). Hal: 2383-2395.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. *Accountability in local Government revenue management: who does what?*. *Journal of Sustainable Development*. 2(2).
- Alexandra Hukom.2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2).
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Lombok: *SNA 17 Mataram*, Lombok. Universitas Mataram.
- Artana Yasa dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1).
- Bassam A. AlBassam. 2013. The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*. 2(4). Hal: 1-18
- Chinweoke, N., Ray, N., and Paschal, N. O. 2014. Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The Macrotheme Review*. 3(7). Hal: 79-87.
- Dalamagas, Basil. 2010. Publik Sektor and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288.

- Edogbanya, Adejoh. 2013. Revenue Generation: Impact on Government Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business Research*.
- Fajrii, Arman dan Yohanes. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2).
- Fasoranti, Mary Modupe. 2012. The Effect of Government Expenditure on Infrastructure on the Growth of the Nigeria Economy, 1997-2009. *International Journal of Economic and Financial Issues*. 2(4). Hal: 513-518.
- Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*. 2(3). Hal: 718-723.
- Kaur, Masjinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *Buletin of Indonesian Economic Studies*. 8(2).
- Mahendra dan Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 11(3). Hal: 863-877.
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala.
- Mehrara, Mohsen, Mosayeb Pahlavani, and Yoursef Elyasi. 2011. Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality. *International Journal of Business and Social science*. 2(7). Hal: 199-207.
- Miranti, Riyana., Alan Duncan, and Rebecca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studie*. 50(3). Hal: 461-482.
- Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah : Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akademi Upy*. 8(2)

- Nurudeen, A., and Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregate Analysis. *Business and Economic Journal*. 4. Hal: 1-11.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. 2012. Effects of Publik Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*. 1(7). Hal: 1-15.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics Finance*. 4(11). Hal: 172-182.
- Peggy dan Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1).
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*. 9(1).
- Siswadi, Putriningsih dan Irwan.2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. *Jurnal ASSETS*. 5(2).
- Suartha dan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(1).
- Suwandi dan Tahar.2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*. 11(1). Hal: 118-136.
- Wijayanti, Darsana. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal EP UNUD*. 4(3). Hal: 1164-1193.